



SIKAP POSITIF DPRD RIAU

Menuju

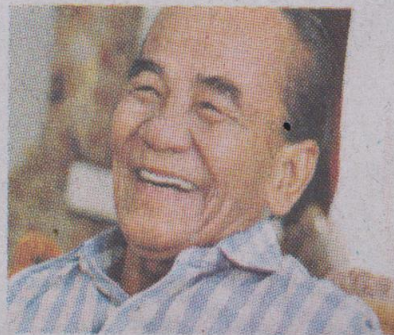
21 Kabupaten Kota

PEKANBARU (HR)-Kamis (4/9) dinihari, Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau mengesahkan empat daerah pemekaran baru. Yang terdiri dari satu pemekaran provinsi yakni Riau Pesisir, dua kabupaten yakni Rokan Darussalam dan Gunung Sahilan Darussalam serta Kota Duri.

Meski sudah mendapat pengesahan DPRD Riau, namun demikian proses keempat wilayah tersebut untuk menjadi daerah baru, masih butuh proses yang panjang. Masih ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi keempat daerah tersebut.

Namun pada saat pembahasan pemekaran Kabupaten Rokan Darussalam, sempat muncul masalah. Dengan alasan pembentukan kabupaten baru itu tidak disertai rekomendasi dari Bupati Rokan Hulu selaku kabupaten induk.

"Bupati Rohul telah mengirimkan surat penolakan pemekaran tersebut pada pimpinan DPRD. Jadi saya mohon ada penjelasan terkait masuknya pembahasan pemekaran Rodas dalam paripurna," jelas Koko Iskandar, anggota DPRD dari Fraksi Demokrat. Menyusul terjadinya



Annas Maamun

aksi walkout, karena tidak didapatkan jawaban yang diinginkan.

Tentunya hal ini menimbulkan polemik dikalangan anggota DPRD sendiri, mengingat mayoritas anggota menginginkan agar hasil keputusan Banmus tersebut, sama-sama dihormati.

Sangat beralasan, sebagaimana diungkapkan Zukri anggota dewan dari PDIP menilai, pemekaran Rodas mesti mendapat perlakuan yang sama dengan pemekaran Provinsi Riau Pesisir maupun Gunung Sahilan Darussalam

FEBRI & YUKI C Liputan Pekanbaru

yang lebih dulu disetujui.

"Kalau Riau Pesisir dan Gunung Sahilan disetujui meski terdapat kekurangan, maka Rodas juga harus disetujui termasuk pemekaran Kota Duri," katanya.

Ketua Komisi A Ilyas Labay menjelaskan, usulan pemekaran Rodas bukan tanpa rekomendasi. "Pemekaran Rodas merupakan rekomendasi DPRD Rohul, meski begitu terdapat kelompok penentang. Kita menerima-nerima keduanya. Selanjutnya kita serahkan pada pimpinan dewan," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Riau Johar Firdaus mengatakan, usulan untuk mengadakan rapat paripurna terkait pemekaran dalam hal ini termasuk Rodas, merupakan hasil Badan Musyawarah (Banmus) DPRD.

"Paripurna ini dijadwalkan Banmus. Jadi bukan atas inisiatif pimpinan Dewan. Yang setelah usulan pemekaran ini disahkan selanjutnya masih tahapan lainnya, seperti rekomendasi gubernur,

Menuju ... Hal 7



Menuju...

Dari Hal. 1

KEMENDAGRI hingga Komisi II DPR RI," ujarnya.

Lihatlah Sumbar

Sementara itu, Gubernur Riau (Gubri), Annas Mamun, mengatakan, Riau kalah dari Sumatera Barat, padahal sumberdaya alam di Sumbar kalah jauh dari Riau.

"Riau kaya akan minyak dan sawit, sedangkan Sumbar hanya ada kerupuk sanjay," seloroh Annas saat sebuah kesempatan.

Selain itu di Sumbar jumlah kabupaten/kotanya jauh melebihi Riau. Padahal, Riau jauh lebih luas dari Sumbar.

"Oleh karena itu kita akan perjuangkan pemekaran di sejumlah daerah di Riau. Seperti Mandau, kita tidak hanya bercita-cita jadi kabupaten, kalau dapat langsung jadi kota saja," ucap Annas.

Respon positif Gubri ini, beberapa waktu lalu sudah menjadi wacana seperti

pembentukan Provinsi Riau Pesisir. Rencananya pemekaran kabupaten Kota di Riau ini, dari 12 Kabupaten Kota menjadi 21 kabupaten Kota.

Bukanlah sesuatu hal yang mustahil, menurut Ketua DPRD Djohar Firdaus, apa yang terjadi di tanah Jawa jarak serta radius yang tidak terlalu jauh. Bahkan sudah di batasi oleh Kabupaten kota yang lain bahkan Provinsi tetanga.

"Hanya kebersamaan, serta kekompakan yang kita butuhkan disini. Komitmen-nya jelas untuk kepentingan dan kesejahteraan Masyarakat Riau, tolong tingalkan ego pribadi, egoisme, jangan lagi ada kepala Daerah yang takut kehilangan wilayahnya atau merasa daerah kekuasaannya menjadi sempit dan sedikit. Namun pandanglah segala sesuatunya sebagai anugerah demi Rakyat Riau umumnya dan kesejahteraan masyarakat

Riau," kata Djohar.

Sesuai dengan Rancangan Program Kerja Menengah Daerah (RPJMD) Kepala Daerah 2014-2019. Yang sudah di sahkan oleh DPRD Riau beberapa waktu lalu, serta ada nya reaksi dari masyarakat, tokoh masyarakat kabupaten kota yang berencana untuk memekarkan diri seperti Inhil selatan (Insel), Rokan Darussalam (Rodas), Gunung Sailan, Mandau, serta Rokan Rengah, Kota Bagan sinembah/Kubu, Rumbai pesisir dan lain sebagainya, sudah layak guna direalisasikan.

Rencana pemekaran Provinsi Riau Pesisir, pecahan dari Provinsi Riau salah satu isi Perda RPJMD. "Jika masyarakat menginginkan pemekaran, tidak boleh menghalang-halangnya bahkan harus didukung maka silakan saja, itu kata Pak Gubernur," tegas Djohar.***